

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Corona virus diseases yang selanjutnya disebut covid-19 telah memiliki efek yang signifikan di seluruh dunia, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Sejak kasus pertama terdeteksi pada awal tahun 2020, virus ini secara cepat menyebar ke seluruh dunia dan menjadi ancaman serius bagi kesehatan serta kehidupan manusia. Pada tanggal 30 Januari 2020 secara resmi *World Health Organization* menetapkan covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan yang meresahkan masyarakat, hal itu dikarenakan penyebarannya yang masif dan cepat ke seluruh dunia (Yamali & Putri, 2020).

Pandemi covid-19 tidak hanya menyebabkan peningkatan kasus infeksi, hospitalisasi, dan kematian di seluruh dunia namun juga berefek domino sampai dengan dampak perekonomian negara. Berbagai langkah pencegahan dan penanganan pandemi yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat, seperti pembatasan sosial, penguncian wilayah, dan peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan, telah memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia.

Keadaan ini juga dialami oleh Indonesia, pandemi covid-19 di level masyarakat memperlihatkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat. Beberapa kelompok, seperti orang yang kurang mampu atau rentan, lebih terdampak oleh pandemi ini dan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tidak hanya level masyarakat dalam level ekonomi atas,

pandemi covid-19 juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi makro, perdagangan, investasi, dan ketenagakerjaan di Indonesia (Andi Amri, 2020). Banyak perusahaan mengalami kerugian besar, sementara orang-orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Kondisi ini mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi yang lebih besar dan tekanan pada sistem fiskal dan keuangan negara (Yamali & Putri, 2020).

Kondisi yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 ini juga dirasakan oleh Pemerintah Indonesia. Dampak yang nyata selain dari sisi Kesehatan adalah sisi ekonomi negara. Beberapa dampak covid-19 bagi pemerintah Indonesia dapat dirangkum sebagai berikut (Yamali & Putri, 2020):

1. Peningkatan pengeluaran pemerintah

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan anggaran besar-besaran untuk menangani pandemi COVID-19, termasuk untuk kebutuhan kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi. Anggaran ini telah mempengaruhi struktur anggaran dan prioritas pengeluaran pemerintah, serta menyebabkan peningkatan defisit anggaran.

2. Penurunan penerimaan pajak dan sumber daya lainnya

Pembatasan dan penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19 telah mempengaruhi penerimaan pajak dan sumber daya lainnya, yang menjadi sumber pendapatan utama pemerintah. Hal ini menyebabkan tekanan pada anggaran keuangan pemerintah dan dapat mengurangi kemampuan pemerintah untuk membiayai program-program publik yang penting.

3. Penurunan pertumbuhan ekonomi

Pandemi covid-19 mempunyai berbagai dampak, salah satunya berdampak pada pendapatan negara. Hal itu tentunya mengurangi kemampuan pemerintah untuk membiayai program-program publik yang penting.



Gambar 1. Refocusing Anggaran dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19
Sumber : Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id)

Dampak tersebut tentunya membuat Pemerintah Indonesia harus membuat kebijakan secara tepat agar dapat mengatasi dampak covid-19. Salah satu solusi yang dilakukan adalah dengan refocusing anggaran. Refocusing anggaran adalah sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengalokasikan kembali anggaran yang telah disepakati sebelumnya untuk prioritas yang lebih penting (Fransisca et al., 2021). Pemerintah Indonesia melakukan refocusing di tengah situasi pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia. Dalam hal ini, refocusing dilakukan untuk mengatasi dampak pandemi yang sangat berdampak pada berbagai

sektor di Indonesia. Refocusing dilakukan dengan memprioritaskan program-program yang berfokus pada bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Dampak kebijakan refocusing anggaran juga berefek kepada Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI. Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI menjadi dua lembaga pertahanan yang juga turut serta dalam upaya penanggulangan COVID-19, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa (Fransisca et al., 2021). Sebagai salah satu matra yang menjadi bagian dari TNI, TNI Angkatan Darat yang selanjutnya disingkat TNI AD memiliki peran yang penting dalam upaya penanganan covid-19. Hal ini disebabkan peran TNI AD sebagai salah satu alat negara yang memiliki peran dalam menjaga ketahanan nasional. Situasi yang diakibatkan oleh Covid-19 dinilai dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional sehingga TNI AD dituntut untuk melaksanakan berbagai tindakan dalam upaya pencegahannya. Dampak pandemi Covid-19 yang berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan APBN turut berpengaruh terhadap proses penganggaran di tubuh TNI AD. Karena perlunya upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 itu, maka TNI AD harus melakukan *refocusing* anggaran. Strategi *refocusing* anggaran adalah strategi melakukan kebijakan keuangan dan penganggaran untuk kegiatan tertentu.



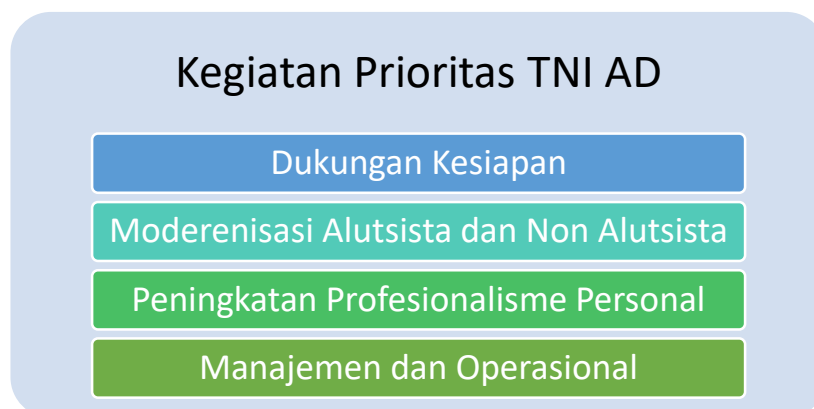
Gambar 2. Refocusing Anggaran TNI AD Untuk Covid-19

Sumber : Pusat Data Reublika (republika.co.id)

TNI AD melakukan kebijakan refocusing untuk memperkuat peran TNI AD dalam membantu pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi. Kebijakan refocusing yang dilakukan oleh TNI AD di antaranya adalah: Mengenai besaran pergeseran dari dana *recofusing* TNI AD terhadap penanganan dampak pandemi covid-19 ini masih tetap mengacu pada regulasi dan dilihat berdasarkan anggaran yang menggambarkan kemampuan keuangan dan anggaran yang dimiliki TNI AD. Kebijakan refocusing yang dilakukan oleh TNI AD di antaranya adalah Peningkatan kapasitas rumah sakit milik TNI AD untuk merawat pasien covid-19, Penugasan personel TNI AD untuk membantu pemerintah dalam pelaksanaan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu juga membantu pelaksanaan operasi yustisi untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Pelaksanaan program bantuan sosial

untuk masyarakat terdampak pandemi serta Penyediaan fasilitas karantina dan isolasi mandiri bagi personel TNI AD yang terpapar covid-19.

Refocusing yang dilakukan oleh TNI AD merupakan upaya yang sangat penting dalam membantu pemerintah Indonesia mengurai dampak covid-19. Refocusing ini diharapkan dapat memperkuat sistem kesehatan, mendukung pemulihan ekonomi, serta memberikan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dan kolaborasi dari semua pihak untuk menjalankan program-program refocusing ini dengan baik dan efektif. Namun kebijakan yang diambil pasti memiliki konsekuensi atau dampak yang harus dihadapi. Tidak terkecuali kebijakan refocusing yang dilakukan oleh TNI AD. Salah satu yang terdampak adalah kegiatan prioritas TNI AD. Kegiatan prioritas TNI AD terbagi menjadi kegiatan, yaitu Program dukungan kesiapan matra darat, Program modernisasi alutsista dan non alutsista/sarana dan prasarana matra darat, program peningkatan profesionalisme personal matra darat dan program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra darat.



Gambar 3. Kegiatan Prioritas TNI AD

Sumber : TNI AD

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki berbagai tantangan dan peluang yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Indonesia adalah dalam menjaga keutuhan wilayah. Hal ini mengharuskan TNI khususnya TNI AD untuk memiliki kebijakan yang dapat memperkuat pertahanan seluruh wilayah Indonesia. Hal ini mengharuskan TNI AD untuk memiliki kebijakan yang dapat memperkuat pertahanan seluruh wilayah Indonesia salah satunya dengan terus meningkatkan kemampuan pertahanan negara melalui modernisasi peralatan militer, baik alutsista dan non alutsista. Dengan adanya refocusing anggaran, kegiatan prioritas ini mengalami pemotongan pagu yang cukup besar diantara kegiatan prioritas lain.

NO	KODE	SEMULA	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REVISI/ PEMOTONGAN
1	2	3	4	5	6
		TOTAL	10.125.630.597.000	6.527.487.226.000	3.598.143.371.000
	012.22.14	Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	1.438.174.188.000	397.240.184.000	1.040.934.004.000
1	1447	Pemeliharaan/Perawatan Ranpur	62.217.764.000	5.044.280.000	57.173.484.000
2	1449	Pemeliharaan/Perawatan Alat Angkut Air	10.478.660.000	0	10.478.660.000
3	1450	Pemeliharaan/perawatan Senjata dan Munisi/Alpal	576.814.448.000	361.237.469.000	215.576.979.000
4	1451	Pemeliharaan /Perawatan Non Alutsista	580.720.516.000	11.464.578.000	569.255.938.000
5	1452	Penyelenggaraan Kegiatan Teritorial Matra Darat	207.942.800.000	19.493.857.000	188.448.943.000
	012.22.15	Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	4.257.393.596.000	2.729.502.903.000	1.527.890.693.000
6	1458	Pengadaan/Penggantian Kendaraan Tempur	294.162.372.000	206.336.747.000	87.825.625.000
7	1459	Pengadaan/Penggantian Pesawat Terbang (Sabang)	119.560.000.000	110.300.000.000	9.260.000.000
8	1460	Pengadaan/Penggantian Alat Angkut Air	2.200.000.000	902.000.000	1.298.000.000
9	1461	Pengadaan/Penggantian Senjata dan Munisi	92.472.894.000	54.863.656.000	37.609.238.000
10	1462	Pengadaan/Penggantian Materiil Alutsista	10.468.400.000	3.309.110.000	7.159.290.000
11	1463	Pengadaan/Penggantian Materiil Non Alutsista	2.684.634.498.000	1.786.746.505.000	897.887.993.000
12	1465	Pengadaan Alutsista Strategis Matra Darat	1.053.895.432.000	567.044.885.000	486.850.547.000
	012.22.16	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat	156.147.176.000	100.530.192.000	55.616.984.000
13	1467	Latihan Bersama Internasional	71.926.607.000	55.385.307.000	16.541.300.000
14	1469	Pendidikan Pembentukan Matra Darat	63.060.426.000	42.882.426.000	20.178.000.000
15	1470	Pendidikan Pengembangan Umum/Rutin Matra Darat	11.479.500.000	0	11.479.500.000
16	1471	Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Matra Darat	7.355.400.000	2.262.459.000	5.092.941.000
17	1472	Pendidikan Profesi dan Keahlian Matra Darat	2.325.243.000	0	2.325.243.000
	012.22.24	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat	4.273.915.637.000	3.300.213.947.000	973.701.690.000
18	1474	Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat	11.235.440.000	11.235.440.000	0
19	1475	Penggiatan Fungsi Matra Darat	27.000.000	27.000.000	0
20	1477	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum	4.013.549.000	0	4.013.549.000
21	1478	Penyelenggaraan administrasi personel	321.606.486.000	318.975.428.000	2.631.058.000
22	1479	Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Fungsional, Fasilitas dan Sarpras Perkantoran	376.141.765.000	130.166.895.000	245.974.870.000
23	1480	Penyelenggaraan Administrasi Perbekalan dan Dukungan Bekal	3.374.005.961.000	2.760.381.338.000	613.624.623.000
24	1482	Penyelenggaraan Administrasi Umum	186.885.436.000	79.427.846.000	107.457.590.000

Gambar 4. Refocusing Anggaran Kegiatan Prioritas TNI AD

Sumber : TNI AD

1.2 Rumusan Masalah

Pandemi COVID-19 telah menghadirkan tantangan serius bagi pemerintah di seluruh dunia. Selain mengatasi dampak kesehatan yang meluas, pemerintah juga dihadapkan pada tugas yang tak kalah penting, yaitu alokasi dana yang memadai untuk penanganan pandemi ini. Pandemi Covid-19 telah membebani keuangan pemerintah dengan meningkatnya pengeluaran dalam berbagai sektor, seperti perawatan kesehatan, bantuan sosial, pemulihan ekonomi, dan pengembangan infrastruktur medis. Dalam situasi ini, penghematan anggaran akan membantu pemerintah memaksimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas, sehingga dapat mengalokasikan dana yang cukup untuk penanganan Covid-19. Salah satu caranya adalah dengan refocusing anggaran di Pemerintahan.

TNI AD sebagai salah satu instansi yang mendapat dana dari pemerintah juga ikut dalam kebijakan refocusing. TNI AD dituntut melakukan refocusing anggaran dengan tujuan untuk memperkuat peran mereka dalam membantu penanganan pandemi. Dari refocusing tersebut maka timbulah kebijakan dan proses yang dilakukan oleh TNI AD. Selain itu juga timbul dampak akibat kebijakan refocusing ini. Terlebih kegiatan yang paling banyak dilakukan penghematan adalah kegiatan prioritas program modernisasi alutsista dan non alutsista.

Olehnya dalam tulisan ini peneliti mencoba menganalisis implementasi kebijakan refocusing TNI AD dalam upaya strategi penganggaran penanganan Covid-19 beserta bagaimana refocusing anggaran berdampak terhadap kegiatan prioritas program modernisasi alutsista dan non alutsista. Hal itu terkait dengan

pentingnya modernisasi alutsista dan non alutsista dalam upaya menghadapi berbagai macam ancaman militer.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan refocusing TNI AD dalam upaya strategi penganggaran penanganan Covid-19?
2. Bagaimana dampak kebijakan refocusing anggaran TNI AD dalam upaya strategi penganggaran penanganan Covid-19 terhadap kegiatan prioritas program modernisasi alutsista dan non alutsista?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan refocusing TNI AD dalam upaya strategi penganggaran penanganan Covid-19;
2. Untuk mendeskripsikan dampak kebijakan refocusing anggaran TNI AD dalam upaya strategi penganggaran penanganan Covid-19 terhadap kegiatan prioritas program modernisasi alutsista dan non alutsista.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang implementasi *refocusing* anggaran pada TNI AD dalam strategi penganggaran dan penanganan Covid-19 ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan memberikan khasanah baru bagi pembaca maupun peneliti berikutnya mengenai kebijakan *refocusing* anggaran khususnya pada TNI AD dalam strategi penganggaran dan penanganan Covid-19. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pustaka acuan, masukan data atau literatur untuk Universitas Gadjah Mada maupun TNI AD pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat berikut ini:

- a. Bagi TNI AD, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyelenggaraan dan implementasi *refocusing* anggaran pada TNI AD dalam strategi penganggaran dan penanganan Covid-19;
- b. Menjadi sarana peneliti membangun pola pikir dan penalaran serta mengetahui kompetensi peneliti dalam penerapan ilmu yang didapat;
- c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan serta bahan masukan dan evaluasi bagi TNI AD.